



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 5 No. 1 Tahun 2023

Strategi Kerjasama Pemerintah Daerah Sebagai Upaya untuk Percepatan Penurunan Stunting di Maluku dan Papua

Penulis

Dodik Briawan¹, Ali Khomsan¹, Dwikani Oklita Anggiruling²

¹ Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

² Program Studi Gizi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bogor Husada

Ringkasan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- (a) Stunting (pendek) menyebabkan berkurangnya kemampuan kognitif serta dapat menyebabkan kerugian ekonomi di masa yang akan datang
- (b) Tujuan policy brief untuk memberikan informasi tentang permasalahan kesenjangan regulasi, efektivitas program, ketersediaan SDM dan data terkait program penanganan stunting
- (c) Pendekatan pentahelix: kerjasama antar pemerintah, pihak swasta akademisi dan media massa dalam percepatan penurunan stunting.
- (d) Pentingnya dukungan multisektor guna mempermudah dalam menurunkan stunting.

Ringkasan

Stunting (pendek) adalah masalah gizi yang sampai saat ini belum terselesaikan. Data survey nasional menunjukkan prevalensi stunting sebesar 24,4 % (SSGI tahun 2021). Khusus di Provinsi Maluku prevalensi tersebut sebesar 28,70%, Maluku Utara 27,5%, Provinsi Papua 29,5% dan Papua Barat 26,2%. Adanya kesenjangan dari segi SDM dan data menjadi faktor terhambatnya program pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting di 4 Provinsi tersebut. Policy brief ini disusun untuk memberikan informasi tentang permasalahan dan strategi dalam program percepatan penurunan stunting yang terkait dengan kesenjangan regulasi, efektivitas program, ketersediaan SDM dan keterbatasan data pendukung.

Strategi Kerjasama Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Untuk Percepatan Penurunan Stunting di Maluku dan Papua

Pendahuluan

Kawasan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti kemiskinan, masalah gizi dan kesehatan. Stunting (pendek) adalah salah satu masalah gizi yang belum terselesaikan hingga sekarang. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia adalah 24,4 %. Prevalensi stunting di Provinsi Maluku sebesar 28,70% dan Maluku Utara 27,5%; sedangkan di Provinsi Papua 29,5% dan di Papua Barat 26,2%. Tanpa upaya yang kuat dari Pemda setempat, pencapaian target nasional sebesar 14% tahun 2024 akan sulit dicapai.

Berbagai upaya percepatan penurunan stunting untuk provinsi-provinsi di Pulau Maluku dan Papua harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas dengan cara melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota/desa) dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam Perpres No 72 tahun 2021 Pasal 17 (ayat f), tugas Tim Pelaksana TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) diantaranya adalah melakukan koordinasi untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai sektor dalam upaya pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.

Policy brief ini disusun untuk memberikan informasi tentang permasalahan dan strategi terkait dengan kesenjangan regulasi, efektivitas program, ketersediaan SDM dan data pendukung program penurunan stunting. Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) tidak semata-mata hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab berbagai elemen di masyarakat. Oleh karena itu perlu implementasi pendekatan *pentahelix*, yaitu kerjasama dan

kemitraan antara pemerintah (*government*), swasta (*private sector*), perguruan tinggi (*university*), media massa (*mass media*), dan masyarakat (*civil society*). Kemitraan ini perlu dijadikan sebagai prioritas agar upaya percepatan penurunan *stunting* dapat berkesinambungan dengan berbagai pihak. Dengan menggemakan permasalahan *stunting* di Papua dan Maluku melalui media massa, maka berbagai potensi yang dimiliki unsur *pentahelix* di wilayah tersebut akan saling bersinergi dalam rangka mempercepat penurunan angka *stunting*.

Pembahasan

Percepatan penurunan *stunting* di empat provinsi dapat dicapai dengan implementasi berbagai kebijakan/regulasi, pelaksanaan program sensitif dan spesifik. Demikian pula diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan program-program pemerintah di daerah lokasi.

Kebijakan dan Regulasi Program Penurunan Stunting

Adanya berbagai aturan, kebijakan dan regulasi ini bertujuan agar pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dapat terlaksana dengan baik. Berikut adalah beberapa kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah di 4 Provinsi seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pembentukan tim teknis, tim koordinasi PPS, dan ditetapkan pula kebijakan terkait KAMU Sehat (Kartu Maluku Utara Sehat) untuk masyarakat tidak mampu yang memiliki balita dan ibu hamil terindikasi risiko stunting

Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting

Efektivitas pada program percepatan penurunan stunting ini dianalisis berdasarkan jenis

intervensinya yaitu intervensi spesifik dan sensitif. Berikut beberapa intervensi spesifik dan sensitif di Pulau Maluku dan Papua:

Intervensi spesifik yang ada di 4 Provinsi diantaranya mengacu pada lima pilar, monev, penilaian aksi konvergensi di kab/kota lokus stunting. Program khas di kabupaten seperti : Duta Parenting (Perangi Stunting), bantuan paket sembako dan vitamin. Pemberian PMT Bumil, pemberian tablet Fe bumil dan remaja, pelayanan gizi buruk, pemberian PMT balita dan imunisasi. Sedangkan pada intervensi sensitif antara lain: Program Keluarga Berencana (KB), pemeriksaan Pasangan Usia Subur (PUS), pendampingan keluarga berisiko stunting, dan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin.

Kesenjangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pelaksana PPPS

Masih terdapat kesenjangan ketersediaan SDM di Maluku dan Papua dalam mendukung program percepatan penurunan stunting (PPPS). Masalah SDM tersebut adalah karena terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, keterampilan dalam pengumpulan dan pengolahan data, keterbatasan pengetahuan dan metode edukasi ke masyarakat, serta banyak petugas lapang yang masih merangkap jabatan.

Ketersediaan Data dalam Pelaksanaan PPPS

Analisis situasi tentang ketersediaan data yang dibuat oleh pendamping di 4 Provinsi cukup beragam. Di Provinsi Maluku dari 4 kabupaten yang dianalisis, 100% tidak melaporkan adanya tantangan dan hambatan. Di Provinsi Maluku Utara dari 5 kabupaten, semuanya menyebutkan adanya tantangan, hambatan dan peluang. Di Provinsi Papua dari 17 kabupaten, sekitar 50% melaporkan adanya hambatan, tantangan dan peluang. Sedangkan di Provinsi Papua Barat dari 4 kabupaten hampir semuanya melakukan analisis SWOT ketersediaan data.

Persentase keseluruhan di 4 Provinsi yang menggunakan PK 21 menjadi sumber data yaitu sebanyak 63,3%. Di Provinsi Maluku 0%, Maluku Utara 100%, Papua 76,5%, Papua Barat 100%. Provinsi yang menggunakan EPPGBM menjadi sumber data yaitu Maluku sebesar 25% Maluku Utara 80%, Papua 58,8%, Papua Barat 25%. Selain data PK 21 dan EPPGBM, terdapat sumber data lainnya (data rutin sektoral) yang digunakan di 4 Provinsi tersebut, yaitu Maluku sebesar 100%, Maluku Utara 80%, Papua 52,9% dan Papua Barat 50%.

Strategi Kerjasama Oleh Pemda dalam Mempercepat Penurunan Stunting

Melalui kerjasama kemitraan antar pelaku pembangunan di daerah diharapkan program percepatan penurunan stunting ini dapat terlaksana dengan baik. Berikut adalah rekomendasi beberapa kerjasama dan kemitraan yang dapat dilakukan oleh Pemda:

1. Kemitraan dengan Swasta

Kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan salah satu skema yang sangat potensial dalam melakukan kemitraan dengan swasta. Konsep CSR tercakup dalam istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) seperti yang tercantum dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) berbunyi, "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Kemitraan dalam perbaikan gizi bersama dengan swasta dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan, diantaranya adalah: 1) Bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang disepakati secara bersama untuk mendukung program percepatan penurunan stunting. 2) Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan terkait stunting dengan dana CSR dengan skema pengabdian kepada masyarakat, termasuk kegiatan KKN maupun Praktik Kerja Lapang (PKL). 3) Membuat

MoU (*Memorandum of Understanding*) dan rencana aksi dengan pemda dalam mendukung menyediakan sarana dan prasarana terkait program spesifik dan sensitif di lokasi stunting.

2. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Di kedua wilayah Maluku dan Papua memiliki beberapa Perguruan Tinggi (PT) yang berpotensi dapat memberikan kontribusi dalam PPS. Sebagai pengemban tri dharma PT, maka misi yang dilakukan tidak hanya berkegiatan dalam belajar mengajar dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan yaitu, 1) Peningkatan pengetahuan & keterampilan (OPD) dalam manajemen data (workshop/pelatihan. 2) Pelatihan pada TPK, kader (PKK, Posyandu, KPM dll). 3) Pelaksana survey daerah terkait dengan gizi, ketahanan pangan atau survey lainnya

3. Kerjasama dengan Media Massa

Dalam proses pembangunan, media massa mempunyai peran penting sebagai agen perubahan di masyarakat. Berbagai rekomendasi dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemda bekerjasama dengan media massa adalah: 1) Media massa memberikan informasi serta edukasi tentang stunting dengan bahasa setempat, baik melalui media cetak/elektronik, 2) Media massa menyampaikan berbagai informasi tentang potensi, budaya dan kearifan lokal yang dapat berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting. 3) Media massa sebagai perantara untuk menyampaikan kepada semua pihak tentang berbagai pesan, pemikiran, harapan, dan pembelajaran dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan.

4. Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat Setempat

Peran dan keikutsertaan para tokoh adat dan tokoh agama dalam pelaksanaan pembangunan di Maluku dan Papua sangat penting. Rekomendasi kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat antara lain dapat dilakukan melalui: 1) Edukasi gizi oleh Pemda kepada para

tokoh agama dan masyarakat setempat terkait permasalahan stunting, 2) Menjadikan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mitra kerja, penggerak dan panutan dalam pelaksanaan program PPS, 3) Penyebaran informasi kepada masyarakat terkait stunting melalui jalur budaya, adat, dan keagamaan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat.

5. Kerjasama dengan Pihak Keamanan

Pulau Maluku dan Papua mempunyai letak geografis yang sangat luas, namun masih terbatas dalam sarana prasarana komunikasi/transportasi. Bahkan di beberapa lokasi masih potensi gangguan keamanan. Institusi seperti TNI-POLRI mempunyai perangkat dan SDM yang sangat baik dalam menghadapi berbagai kendala tersebut.

Pada bulan Agustus 2022 BKKBN telah membuat MOU dengan TNI-POLRI dalam kerangka program percepatan PPS. Instansi TNI (AD-AU-AL) dan POLRI mempunyai fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik) yang lengkap serta struktur komando yang kuat dari pusat sampai dengan tingkat desa (masyarakat) yaitu petugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Kesimpulan

Konsep pembangunan dalam paradigma pembangunan masyarakat madani (*civil society*), pendekatan kerjasama antar *stakeholders* diperluas menjadi *penta-helix* yang melibatkan lima aktor, yaitu: pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, dan media (ABCGM) penting dilakukan untuk membantu penurunan angka stunting.

Program percepatan penurunan *stunting* di daerah dapat memberikan hasil yang maksimal, jika dilakukan penguatan terhadap regulasi, kebijakan serta program yang selama ini sudah ada. Prinsip keberhasilan pelaksanaan kerjasama antar *stakeholders* di daerah didasarkan pada tiga hal yaitu adanya: keterbukaan, kesetaraan, dan saling menguntungkan.

Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. (2022, 11 24). Retrieved from [cnnindonesia.com:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220629213522-20-815268/bkkbn-angkat-ksad-dudung-jadi-duta-bapak-asuh-anak-stunting- indonesia](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220629213522-20-815268/bkkbn-angkat-ksad-dudung-jadi-duta-bapak-asuh-anak-stunting- indonesia).
- Corbin JH, Jones J, and Barry MB. 2018. What makes intersectoral partnerships for health promotion work? A review of the international literature. *Health Promot Int.* 33(1): 4–26.
- Corrigan MB, Hambene J, Hudnut III W, Levitt RL, Stainback J, Ward R, Witenstein N. 2005. Ten Principles for Successful Public/Private Partnerships. Washington [USA]: Urban Land Institute.
- Drewnoski Drewnowski A, Caballero B, Jai K Das, French J, Prentice AM, Fries LR, van Koperen TM, Klassen-Wigger P, Rolls BJ.. 2018. Novel public–private partnerships to address the double burden of malnutrition. *Nutrition Reviews.* Vol. 76(11):805–821.
- [GAPMMI] Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia. 2018. Peran Dunia Usaha dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Stunting. Makalah disampaikan pada Pra WNPG XI. Jakarta.
- Jouwe MY, Troena EA, Surachman, Setiawan M. 2011. Pengaruh peran tiga tungku (tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama) dalam gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparat kampung di Kota Jayapura. *Jurnal Aplikasi Manajemen.* 9 (1): 241-25.
- [KEMENKES] Kementerian Kesehatan. 2020. Best Practices: Pendampingan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Jakarta.
- [KEMENKES RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/3647/2021 Tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Anggaran. Jakarta.
- KEMENPERIN. (2022, 11 26). Retrieved from kemenperin.go.id:
<https://kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=&prov=0>
- PDDIKTI. (2022, 11 26). Retrieved from <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
- [SSGI] Survey Status Gizi Indonesia. 2021. Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten/Kota tahun 2021 [internet]. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. [dikutip 13 November 2022]. Tersedia dari: <https://www.litbang.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgitahun-2021/>.

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Dodik Briawan, mempunyai latar belakang akademik di bidang ilmu gizi masyarakat. Saat ini sebagai dosen di Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, IPB University. Saat ini sebagai editor-in-chief Jurnal Gizi dan Pangan (Sinta 2). Pengalaman kerja pernah sebagai Sekretaris Departemen dan Ketua Program Studi Pasca Sarjana ilmu gizi. Penelitian yang didalami adalah masalah gizi pada remaja, termasuk perilaku makan, kualitas diet, defisiensi zat gizi mikro, terutama zat besi. (**Corresponding Author**) dbriawan@apps.ipb.ac.id



Ali Khomsan, merupakan Guru besar IPB University di bidang Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga. Selain mengajar juga terlibat sebagai Dewan Editor berbagai jurnal seperti Jurnal Gizi dan Pangan, Media Gizi dan Keluarga, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, dan Majalah Pangan (Bulog).



Dwikani Oklita Anggiruling, merupakan Dosen bidang Gizi Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bogor Husada



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680